

## **Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP AI Ma'soem Jatinangor Sumedang**

**Dadang Supriyanto<sup>1</sup>, Dadan Hidayatullah<sup>2</sup>, Badrudin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail : [dsupriyanto.ypamihs@gmail.com](mailto:dsupriyanto.ypamihs@gmail.com)<sup>1</sup>, [lisnauqda@gmail.com](mailto:lisnauqda@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dr.badrudin@uinsgd.ac.id](mailto:dr.badrudin@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan agar diketahui pemenuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan SNP di SMP AI Ma'soem Jatinangor. Dengan menggunakan metode kualitatif sederhana (mini riset) dengan metode deskripsif (mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti). Teknik yang dipakai penelitian ini yakni observasi. Pelaksanaan 8 standar Nasional Pendidikan, sesuai data yang didapatkan yaitu 1) standar isi dicapai 92%, 2) standar proses mencapai 90%, 3) standar kompetensi lulusan mencapai 94%, 4) standar tenaga pendidik dan kependidikan mencapai 85%, 5) standar sarana dan prasarana mencapai 85%, 6) standar pengelolaan mencapai 90%, 7) standar pembiayaan mencapai 90%, dan 8) standar penilaian mencapai 93%; Hasil penelitian analisis pemenuhan SNP di SMP AI Ma'soem telah terlaksana dengan baik diberikan kesimpulan bahwa pemenuhan delapan standar nasional Pendidikan pada SMP AI Masoem Jatinangor telah terpenuhi sesuai keadaan yang ada. Standar yang perlu menjadi perhatian yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan, dan standar sarana prasarana.

**Kata kunci:** *Analisis, Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan*

### **Abstract**

This research aims to find out the factors that influence the maintenance of SNP at AI Ma'soem Middle School, Jatinangor. By using a simple qualitative method (mini research) with a descriptive method (describing the actual situation of the object being studied). The technique used in this research is observation. Implementation of 8 National Education standards, according to the data obtained, namely 1) content standards reached 92%, 2) process standards reached 90%, 3) graduate competency standards reached 94%, 4) teaching and education staff standards reached 85%, 5) standards facilities and infrastructure reached 85%, 6) management standards reached 90%, 7) financing standards reached 90%, and 8) assessment standards reached 93%; The results of research analysis on the provision of SNP at AI Ma'soem Middle School have been carried out well and provide the conclusion that the provision of eight national education standards at AI Masoem Middle School Jatinangor has been fulfilled according to existing conditions. The standards that need attention are the standards of teaching and educational staff, and the standards of infrastructure.

**Keywords:** *Analysis, Education, National Education Standards*

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dari pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu dikuatkan dari UUD

1945 pasal 31 yang secara inti menerangkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran (pendidikan). Sehingga, hal itu menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab dan berkewajiban dalam memenuhinya pendidikan tiap warga negara untuk membuat tujuan nasionalnya terwujud, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan menjadi sebuah proses yang mempunyai tujuan, disebutkan pendidikan berlangsung dengan baik bila dapat berfungsi secara komprehensif, kontekstual, dan proporsif ketika menjawab beserta memenuhinya kebutuhan masyarakat dan menuntut perkembangan serta perubahan zaman. Agar hal itu tercapai, sehingga dibutuhkan perangkat/siswa pendidikan, entak itu yang sifatnya keras (hardware) ataupun lunak (software). Sistem pendidikan nasional pada undang-undang mempunyai proses yang membutuhkan standar pendidikan nasional.

Pemerintah sudah melaksanakan bermacam perubahan pada sistem standarisasi pendidikan, sesuai yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Rpublik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah mengalami beberapa perubahan. Penyesuaian Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2013 dari PP No 32, disesuaikan kembali tahun 2015 melalui PP No 13, disesuaikan kembali tahun 2021 melalui PP No 57 dan penyesuaian terakhir tahun 2022 melalui PP No 4 tahun 2022.

Sekolah yang mutunya baik dan standar nasional pendidikan sudah terpenuhi, masih perlu selalu dikembangkan. Diterangkan pada Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pada pasal 5 bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dengan begitu saat ini sekolah yang mempunyai mutu dibutuhkan di masyarakat yang menjadi perhatian untuk para pemerhati pendidikan.

Komitmen Pemerintah, seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni melakukan pendidikan yang mempunyai mutu. Hal ini tertuang pada Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hal itu mengartikan bahwasanya setiap anak Indonesia mempunyai hak memperoleh pendidikan yang bermutu. Terdapatnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), arti bermutu akan jelas, yakni memenuhinya standar yang berupa: 1) standar penilaian; 2) standar pembiayaan; 3) standar pengelolaan; 4) standar sarana dan prasarana; 5) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 6) standar kompetensi lulusan; 7) standar proses; dan 8) standar isi. Mengartikan bila SNP dilakukan menyebabkan terdapat jaminan bahwasanya akan terjadi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menurut Tilaar (2006), fungsi SNP yakni menjadi: 1) memetakan masalah pendidikan, 2) mengukur kualitas pendidikan, dan 3) menyusun rencana dan strategi pengembangan setelah didapatkan data-data dari evaluasi belajarnya dengan nasional berupa Ujian Nasional. Mencapai SNP bisa diketahui dari hasil akreditasinya yang dilihat sesuai standar. Mencapai SNP yang meningkat bisa terlihat pada hasil akreditasi setiap tahunnya. Pada penilaian ini, SMP Al Ma’soom Jatiningor mempunyai hasil akreditasi dari setiap SNP harus dilakukan analisis disebabkan akan dijadikan bahan masukan untuk beberapa pemangku kepentingan dalam memastikannya proses pelajaran yang mempunyai mutu. Maksud dari analisis tersebut harusnya dapat menunjukkan pencapaian dan kekurangan setiap standarnya.

Terkait pokok permasalahannya. Penelitian ini tujuannya agar 1) dikaji kecenderungan dalam mencapai SNP sesuai hasil akreditasi di SMP Al Ma’soem; dan 2) beberapa hal yang harus diperbaiki dalam membuat capaian SNP meningkat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pada dunia industri, standar diartikan sebagai suatu kebutuhan yang menjadi dasar untuk memudahkan proses produksi dalam menjamin kualitas yang baik, dengan begitu terbebas dari kekurangan dan hal itu masuk pula pada bidang pendidikan (Tilaar, 2012, 35–36). standardisasi yaitu pengejawantahan dari “semua dapat diukur”, serta saat semuanya

bisa terukur sehingga efisiensi bisa tercapai serta kualitas produk serta jasa terlihat (Tilaar, 2012:48). pendidikan memerlukan suatu standar, hal itu disebabkan pendidikan yaitu suatu proses yang tujuannya jelas dan menjadi sistem yang saat ini dikenal sebagai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pada konteks Sisdiknas dibutuhkan standar yang harus dipenuhi agar tujuan tercapai. Diperlukannya standar pendidikan dijelaskan Tilaar (2012: 76–77) karena beragam alasannya seperti *pertama*, standarisasi pendidikan nasional yaitu penuntutan politik dalam melihat seberapa jauh warga negara memiliki visi yang sejalan dan keterampilan serta pengetahuan untuk meningkatkan negara. *Kedua*, standarisasi pendidikan nasional yaitu penuntutan globalisasi yang mana Indonesia menjadi unsur dunia melakukan persaingan serta perlu agar selalu menambah kualitas dalam menjadikannya negara maju melalui sumber daya manusia yang kualitasnya tinggi dan bisa ikut serta membuat mutu kehidupan manusia meningkat.

Dari hal itu di atas, standar sebagai dasar untuk menetapkan acuan menyelenggarakan pendidikan yang menjadi upaya agar tujuan tercapai. Pendidikan diselenggarakan bukan sekadar dibatasi dari penyelenggaraan pendidikan namun lebih kepada mutu pendidikan.

Dari konsep lainnya, pendidikan menjadi jasa pelayanan yang perlu mempunyai mutu. Posisi dari dunia pendidikan berupa institusi jasa ataupun disebut juga industri jasa yang melayani berdasarkan keinginan konsumen serta selanjutnya diperlukan sistem yang bisa meneruskan institusi pendidikan untuk lebih baik (Zazin, 2011: 62–63). Zazin juga menerangkan bahwa sesungguhnya mutu dilihat dari mutu produksi yang kriterianya berdasarkan spesifikasi, terus baik dari awal, tanpa cacat, cocok dengan pembuatan dan penggunaan.

Di Indonesia, pendidikan sudah tersusun pada SNP. Pada UU Sistem Pendidikan Nasional, dikarenakan SNP yaitu kriteria minimalnya mengenai sistem pendidikan di semua daerah di Indonesia. SNP ditentukan pemerintah serta satuan pendidikan perlu memenuhinya dan seluruh pemangku kepentingan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Ada alasan diperlukannya standar nasional di Indonesia yakni *pertama*, Indonesia menjadi negara berkembang yang komitmen pemerintahnya baik daerah ataupun pusat saat memberikan dana yang masih rendah. *Kedua*, negara kesatuan yang penilaiannya dibutuhkan dari sistem kerja Sisdiknas. *Ketiga*, Indonesia menjadi anggota global yang ada pada kelompok negara yang lain untuk bisa diketahui keperluan sumber daya manusia yang bisa melakukan persaingan dari negara lainnya, jadi kualitas pendidikan sebagai indikator tetap yang perlu dicapai. *Keempat*, SNP berfungsi dalam mengukur kualitas pendidikan, terdapatnya standar yang tidak sebagai ukuran statis namun nantinya selalu mengalami peningkatan. *Kelima*, standar berfungsi agar masalah pendidikan dipetakan. *Keenam*, SNP mempunyai fungsi dalam melakukan penyusunan rencana dan strategi peningkatan sesudah didapatkan data evaluasi belajarnya (Tilaar, 2012: 106-109).

Standar penting agar menjadi dasar menyelenggarakan pendidikan nasional sebagai sesuatu yang perlu dicapai. SNP fungsinya menjadi dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pendidikan untuk membuat mutu pendidikan nasional terwujud, SNP bertujuan pula dalam menjaminkannya mutu pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuknya karakter dan kemajuan bangsa yang mempunyai martabat.<sup>7</sup>

Terdapatnya SNP, satuan pendidikan bisa membuat SNP menjadi tolok ukur menyelenggarakan pendidikan, SNP dijadikannya pula dasar dalam memantau dan mengevaluasi pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia khususnya pada satuan pendidikan agar mutunya lebu mudah dinilai dan diukur. Pencapaian standar bisa dijadikan tolok ukur dalam menetapkan langkah memperbaiki dan kebijakan yang nantinya dilaksanakan untuk menambah mutu pendidikan.

Menyusun SNP dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dijadikan lembaga

yang terbentuk dari pemerintah berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 35 ayat (3) yang mempunyai isi tentang pengembangan SNP, pelaporan dan memantau capaian dengan nasional yang badan standardisasi lakukan, pengendalian, dan penjaminan mutu pendidikan. BSNP yaitu lembaga profesional dan berdiri sendiri dalam menjalankan misi untuk dilakukan pengembangan, pelaksanaan dipantau, dan dievaluasi penyelenggaraan standar nasional pendidikan.<sup>8</sup> kewenangan dan tugas BSNP yaitu membantunya Menteri Pendidikan Nasional serta berwenang dalam meningkatkan SNP, melaksanakan Ujian Nasional (UN), merekomendasikan pada pemerintah daerah dan pusat untuk mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan, dirumuskan syarat kelulusannya dalam satuan pendidikan, dan kelayakan kegrafikaan, penyajian, bahasa, serta isi buku teks pelajarannya. Standar yang BSNP kembangkan efektif dan seluruh satuan pendidikan diikat dengan nasional. SNP yang tersusun perlu diperbaiki dengan lebih teratah, terencana, dan berkesinambungan berdasarkan tuntutan kehidupan global, nasional, dan lokal yang berubah.

BSNP sebagai lembaga terpenting untuk memastikan pendidikan bermutu diselenggarakan. Tentunya BSNP harus selalu dikaji dari data yang didapatkan agar terus ditingkatkan dan diperbaiki kualitas pendidikan. Penguatan peran BSNP diperlukan sebagai upaya dalam penyusunan kebijakan mutu pendidikan dengan berbagai standar yang dibentuk berdasarkan keadaan wilayah Indonesia yang selanjutnya untuk bisa maju secara bersamaan dengan negara lainnya agar terwujud pendidikan yang bermutu.

#### **Komponen Standar Nasional Pendidikan**

SNP yaitu kriteria minimal mengenai system pendidikan di semua daerah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipakai menjadi dasar untuk mengembangkan pembiayaan, pengelolaan, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, dan kurikulum (UU Sisdiknas Pasal 32 ayat (2)). SNP meliputi delapan standar yakni standar sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, proses, dan standar isi. Hubungan antar-standar tersebut tergambar pada gambar 1.

Menurut BSNP, pengembangan delapan standarnya dan penetapan pengukuran, evaluasi, dan penilaian mutu pendidikan, yang memberikan hasil sebagai acuan dalam penyusunan program meningkatkan mutu pendidikan. Dilihat dari keadaan pendidikan di Indonesia yang sangat bermacam. Dipastikan SNP tidak menyeragamkan namun mengakomodasi keberagaman, untuk membuat pendidikan masih pada standar mutunya jadi seluruh satuan pendidikan mempunyai peluang yang setara memperoleh mutu pendidikan.

Jika dilihat dari Gambar 1, delapan standarnya terbentuk suatu sistem menyelenggarakan pendidikan dengan serangkaian komponen *input* yang meliputi pembiayaan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaannya. Komponen proses meliputi penilaian, proses, dan isi, serta komponen *output* yakni kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan nantinya yang mempunyai nilai tinggi jika *input* dipenuhi seluruhnya dan prosesnya berlangsung secara baik. Delapan standar itu ada pada PP No. 19 Tahun 2005 yang selanjutnya ada berbagai perubahan yang terdapat pada PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2015, PP No. 57 tahun 2021 dan PP No. 4 tahun 2022. Komponen-komponen masing-masing standar terdapat pada berbagai peraturan menteri.



## METODE

Metodologi yang dipakai pada penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif sederhana (mini riset) melalui metode deskriptif (mendeskripsikan kondisi sebetulnya dari objek yang ditelitinya). Penelitian ini memakai teknik observasi. Data yang dipakai ialah data sekunder dari Badan Akreditasi Nasional dan Badan Akreditasi Provinsi. Aspek yang dilihat pada akreditasi berupa Standar Penilaian, Pembiayaan, Pengelolaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kompetensi Lulusan, Proses, dan Standar Isi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi di SMP Al Ma'seom Kabupaten Sumedang yang telah diakreditasi tahun 2019, umumnya delapan SNP yang diterapkan sudah dipenuhi Standar Nasional. Hal itu terlihat dari adanya penyesuaian dari hasil penelitian dan hasil akreditasi yang sekolah capai yakni memperlihatkan peringkat A (Akreditasi A).

**Hasil Rekapitulasi Pemenuhan 8 SNP Pada SMPN Di Sul-Sel**

No	Komponen Standar	Hasil dalam %	Ketercapaian
1	Standar Isi	92%	Sangat Baik
2	Standar Proses	90%	Sangat Baik
3	Standar Kompetensi Lulusan	94%	Sangat Baik
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85%	Baik
5	Standar Sarana Dan Prasarana	85%	Baik
6	Standar Pengelolaan	90%	Sangat Baik
7	Sntadar Pembiayaan	90%	Sangat Baik
8	Standar Penilaian	93%	Sangat Baik
	Rataan	90%	Sangat Baik

Sesuai yang terlihat dari tabel 1, memperlihatkan bahwa : SMP Al Ma'soem Jatinangor Kab Sumedang melakukan 8 SNP yang skor rata-ratanya 90%, kualifikasinya Sangat Baik;

Tertuju pada tabel 1 di atas, umumnya SNP yang diterapkan pada SMP Al Ma'soem

Jatinangor Kab Sumedang terlihat dari setiap standar yaitu berupa: (1) Standar Penilaian pendidikan 93%, (2) Standar pembiayaan adalah 90%, (3) Standar Pengelolaan 90%, (4) Standar sarana dan Prasarana 85%, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 85%, (6) Standar Kompetensi Lulusan 94%, (7) Standar Proses Pembelajaran 90%, dan (8) Standar Isi 92%.

Dari grafik dan tabel di atas, sehingga diterangkan setiap standar berikut ini :

#### 1. Standar Isi

Standar ini telah dicapai 92% dikarenakan kecerdasan keterampilan, spiritual, pengetahuan, dan sikap sosial standar isi sudah disertai perangkat pembelajaran guru. Dari hasil wawancara wakil di atas telah baik, hal itu bisa terlihat dari pengorganisasian Sekolah yang mempunyai Tim Pengembang Kurikulum yang menyiapkan dan melaksanakan manajemen standar isi berupa : menyusun rumusan Visi, Misi, dan tujuan satuan pendidikan, menyusun muatan kurikulum dengan nasional, kekhasan dan daerah satuan pendidikan, mengatur beban belajar, menyusun kalender pendidikan. Berdasarkan analisis keperluan strategis pada mengimplementasi manajemen standar isi, yakni sekolah mempunyai dokumen KTSP yang tersusun serta berkembang dengan mekanisme menyusun kurikulum, dilakukan dengan bentuk pengajaran sesuai 7 prinsip yakni menyertakan lembaga bersangkutan, berisi kompetensi dasar pada indikator semua mata pelajaran serta mencapai target kurikulum. (permen Diknas, No. 22, tahun 2006 : 9) tentang standar isi, dan (permendiknas No. 6 tahun 2007 : 9) tentang kebijakan pemerintah bahwa sekolah wajib mengembangkan kurikulum KTSP. Slamet PH dalam Sri hartati (2000:4), menerangkan bahwa manajemen yang basisnya Sekolah menjadi pengoordinasian untuk penyesuaian sumber daya yan dilaksanakan dengan otonomi oleh Sekolah dengan berbagai input-input manajemen dalam mencapai tujuan sekolah melalui keterlibatan seluruh *stakeholder* untuk mengambil keputusan yang aspiratif.

#### 2. Standar Proses

Proses pendidikan ialah kunci keberlangsungan proses belajar, yang mana program pendidikan diimplementasikan. Bryk dan Hermanson menerangkan “inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya.” (1993, p. 455). Kurang baiknya dan belum lancarnya proses pembelajaran di banyak sekolah, mengakibatkan mutu pendidikan rendah. Proses pembelajaran mutunya bergantung dari beberapa aspek, khususnya fasilitas yang mendukung seperti fasilitas peralatan, gedung, dan yang paling utama yaitu guru dan kondisi pembelajaran.

Standar proses di SMP Al Ma'soem sudah dicapai 90% dikarenakan sekolah sudah membuat RPP dan silabus yang dimuat komponen-komponen RPP dan silabus. SMP Al Ma'soem telah merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang berupa aktivitas pemantauan, supervisi, evaluasi, melapor, dan tindak lanjutnya agar diselenggarakan oleh guru, pengawas/kepala sekolah untuk melaksanakan pembelajaran, memantau proses pembelajarannya dimulai pada tahapan mempersiapkan, melaksanakan, serta menilai hasil pembelajarannya melalui cara mengamati, mencatat, dan mendokumentasi, supervisi pembelajaran yang dilaksanakan di tahap merencanakan, melaksanakan, dan menilai dari cara mendiskusikan, melatih, serta konsultasi. Mengevaluasi proses pembelajaran dalam menetapkan kualitas pembelajaran dengan keseluruhan melalui identifikasi kinerja guru berdasarkan kompetensi yang dimiliki, melapor hasil pemantauan PBM terhadap pemangku kepentingannya, hasil supervisi serta menindak lanjuti hasil yang dipantau ataupun hasil supervisi berdasarkan program dan mekanisme Sekolah berupa memberikan penghargaan, menegur dan memberi peluang dalam mengikuti pelatihan. (permen Diknas No. 41 tahun 2007:11) mengenai standar proses yang mengaturnya aktivitas inti sekolah yakni melaksanakan pelajaran berupa mengawasi, memantau, supervisi, mengevaluasi,

melapor, dan menindak lanjut.

Guru sudah melakukan standar proses secara benar, tertuju dari SK, KD, tujuan serta indikator pembelajaran semua mata pelajaran, yang disusun dengan sistematis, melalui beban dan waktu belajar siswa yang tepat. Kualifikasi standar proses telah baik, harus selalu dikembangkan khususnya pada tiap pembelajaran harus berakhir dengan menilai proses dan dibantu oleh supervisi kepala sekolah dengan terjadwal dan tersusun.

### 3. Standar Kompetensi Lulusan

Pada Standar Kompetensi Lulusan Tim Pengembang Kurikulum SMP Al Masoem telah mengatur dan melaksakan standar kelulusan di jenjang satuan pendidikan, diatur kompetensi minimal yang perlu peserta didik capai sesudah melakukan proses pelajaran di satuan pendidikan tertentu yang mencakup keterampilan, sikap, serta pengetahuan pada mengimplementasikan aktivitas yang berkaitan pada siswa sesuai yang ada dalam (Permen Diknas No. 23 tahun 2006:13) tentang standar kompetensi lulusan yang diatur syarat lulus peserta didik dari satuan pendidikan. Melaksanakan program dalam membentuk karakter, karya kreatif, keagamaan, kelengkapan daya dukung KKM serta pendukung pembelajaran yang lain meliputi : kebersihan, budaya lokal, kepedulian lingkungan, dan kepramukaan (permen Diknas 6 tahun 2007 : 9) mengenai kebijakan pemerintah bahwa sekolah wajib melakukan pengembangan kurikulum.

Standar kompetensi lulusan dicapai 94%, dikarenakan telah menggambarkan sikap bertakwa dan beriman, sikap sosial dengan perilaku rohani dan jasmani, gerakan literasi, dan karakter. Kegiatan yang memperlihatkan keterampilan berperilaku secara kolaboratif, komunikatif, dan individu telah baik. Hanya harus selalu dilakukan, maka menjadi kebiasaan yang juga baik. Pengembangan pengetahuan yang dilakukan sekolah meliputi pengetahuan metakognitif, prosedur, konsep, dan fakta, harus guru kuasai agar aktivitas pembelajaran memperlihatkan dimensi kemampuan siswa dalam berpikir kritis, produktif, dan kreatif belum terlihat. Sudah baiknya kualifikasi standar lulusan, harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan untuk membuat sikap sosial, keterampilan, pengetahuan, dan sikap spiritual siswa menjadi terinternalisasi pada dirinya.

### 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yaitu tenaga pendidik, yang menjadi suatu keahlian profesional yang mempunyai kompetensi pada bidang pendidikan. Pada proses globalisasi yang mana perubahan dialami dengan pesat menuntut guru agar selalu melakukan penyesuaian kompetensi dari perkembangannya. Tilaar, H.A.R., (2004, pp.:141-142) menulis : "Today teachers participate in the process of change and development especially in preparing intelligent citizens and skilled manpower. In line with efforts towards universal basic education, a large number of teachers are required, mostly in a short time. This has bad effects on the teaching profession, the requirements for entering the teaching profession are reduced. As a result the image of teaching profession is severely tarnished. The image of the teaching profession of yesterday has gone." Di satu sisinya, terlihat banyaknya guru pada kota besar yang mempunyai kompetensi mengajar serta melakukan tugasnya dengan profesional. Sedangkan menurut Sutarrahan, (2007:117) bahwasanya "guru dan kepala sekolah merupakan pelaku profesi yang harus menerapkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik secara maksimal dengan memenuhi beberapa ketentuan, sehingga dapat menciptakan out put yang diharapkan oleh intansi pendidikan." Kemudian Imron, (2007: 132) diungkapkan bahwasanya "untuk memaksimalkan potensi sekolah termanfaatkan dalam pengelolaannya, sekolah hendaknya memiliki tenaga administrasi yang mampu dan memahami tentang tata administrasi sekolah, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tidak kehilangan data tentang inventarisasi sekolah." Pandangan mengenai mencapai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Menggambarkan bahwa umumnya sekolah diharap mempunyai tenaga pendidik dan kependidikan yang standarnya

berdasarkan BSNP dan bisa memanfaatkan kompetensi yang dimiliki dengan optimal.

Secara umum manajemen pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMP Al Ma'soem sudah cukup baik, hanya jumlah guru tidak tercukupi, walaupun kualifikasi guru telah berdasarkan tuntutan undang-undang. Tetapi, tidak seluruh guru memperoleh sertifikat pendidik. Namun semua guru melakukan upaya pengembangan kompetensi profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik. Permasalahan penting yang harus diperhatikan Yayasan yaitu sekolah belum mempunyai guru/konselor BK berdasarkan rasio jumlah rombongan belajar. Tenaga laboran dan pustakawan yang belum kualifikasi dan jumlah tendik yang belum memenuhi standar. Dari dasar itu juga sehingga kualifikasi standar PTK paling rendah yakni hanya mencapai 85%.

#### 5. Standar Sarana dan Prasarana

Sekolah yang melakukan standar sarana dan prasarana yang sudah bisa diselenggarakan pada standar nasional pendidikan. Melaksanakan pengelolaan yang manajemen sekolah lakukan yaitu upaya optimal dalam menggunakan dan merawat semua suatu hal yang sifatnya milik sekolah pada konteks sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Manajemen sekolah swasta dan negeri yang mengelola sarana dan prasarana mempunyai perbedaan terkait prosedur perolehannya, sekolah swasta bisa mendapat bantuan dari pemerintah dengan dana hibah dan bisa diperoleh juga dari pihak yayasan, sementara sekolah negeri sumbernya sekadar dari dana pemerintah. Hal itu sejalan pada Tilaar, (2004:3.18) bahwasanya "faktor lain yang sangat berperan dalam penataan sekolah agar dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan secara maksimal adalah terpenuhinya standar sarana dan prasarana sekolah, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap." Pandangan lainnya diungkapkan pula oleh Ali, (2008:119) bahwasanya "Sekolah hendaknya memiliki sarana dan prasarana penunjang pendidikan secara baik dan mencukupi semua kepentingan proses pembelajaran, sehingga kegiatan yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal serta dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah maupun tujuan secara umum tentang kualitas lulusannya." Pandangan di atas memperlihatkan sarana dan prasarana sangat penting yang bisa membantu pelaksanaan sekolah, entah itu pada keadministrasian ataupun pembelajaran.

Dari hasil wawancara bersama wakil sarpras di SMP Al Ma'soem Jatiningor implementasi manajemen standar sarpras sudah baik, hal itu bisa terlihat dari pengelolaan Sekolah yang mempunyai tim pengembang Sekolah yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan perwujudan manajemen sarpras mengenai aktivitas yang berhubungan dengan sarpras pembelajaran berupa upaya memenuhi rasio luas lahan, bangunan, dan keamanan sekolah. (Permendiknas No. 24 tahun 2007:23) mengenai standar sarana prasarana bagi madrasah/sekolah. Keadaan lahan sekolah telah sangat memadai serta luas yang dimiliki sesuatu persyaratan. Luas lantai bangunan telah sangat baik, syarat kesehatan dan keselamatan telah terpenuhi, Sekolah harus mengupayakan gedung dan tempat parkir yang khusus. Prasarana lainnya yang perlu sekolah sediakan meliputi Laboratorium, Gudang, UKS, perpustakaan, dan ruang administrasi. Harus menata dan memelihara Kuantitas standar Sarpras dengan baik, dan harus ditambah aktivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Dari dasar tersebut, sehingga kualifikasi standar ini sekadar 85%.

#### 6. Standar Pengelolaan

Pada sekolah negeri dan swasta, standar pengelolaannya sudah mempunyai standar nasional pendidikan serta bisa memberi pengalaman khusus untuk peneliti saat meneliti dan mengamati semua yang sudah manajemen sekolah lakukan. Pengelolaan yang dilaksanakan memperlihatkan sudah berlangsung secara optimal dan baik, walaupun masih terdapat berbagai hal yang perlu didukung sepenuhnya dari pemerintah serta

sifatnya tidak ikut campur pelaksanaan sekolah untuk manajemen sekolahnya. Sekolah swasta yang melaksanakan pengelolaan lebih leluasa serta tidak terdapat intervensi dari pihak pemerintah pada manajemen berbasis sekolah yang memenuhi BSNP, sementara sekolah negeri selalu terjadi dualisme kebutuhan untuk mengelola sekolah. Pada kenyataannya yang memperlihatkan bahwasanya sekolah swasta unggul mengenai sarana dan prasarana menjadi suatu hal yang secara umum tidak berlaku, karena untuk sekolah swasta yang tidak mempunyai kemampuan keuangan bisa ada di bawah sekolah negeri, tetapi pada sistem pengelolaan menurut Imron, (2007:152) bahwasanya kompetensi pelaksanaan sekolah pada sekolah swasta lebih diutamakan yang lebih mempunyai potensi terhadap rekrutmen tenaga kerja, maka sekolah swasta mempunyai tenaga yang lebih berkompentensi dan handal daripada di sekolah negeri, meskipun hal ini tidak terjadi di setiap sekolah swasta. Diartikan kondisi ini hanya untuk sekolah swasta yang yayasan pemilik telah mempunyai finansial yang lebih mapan dan mempunyai tujuannya agar perkembangan yang tinggi.

Standar pengelolaan yang dicapai di SMP Al Ma'some telah baik dicapai 90%. Secara umum, sekolah mempunyai visi, misi, dan tujuan beserta program kerja jangka menengah dan program kerja tahun. Sekolah mempunyai dokumen struktur organisasi, pengelolaan pendidikan, dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasinya standar pengelolaan telah baik, tapi visi, misi dan tujuan sekolahnya harus dilengkapi melalui dokumen, penetapan, penyusunan, dan sosialisasi berupa daftar hadir, penetapan, dan berita acara.

#### 7. Standar Pembiayaan

Bendahara dan kepada sekolah yang melaksanakan RKAS dilakukan dengan bertanggung jawab dan terbuka serta tidak dilaksanakan suatu hal yang menyimpang dari membiayai gaji, honor aktivitas dan pembelian barang. Standar biaya yang sekolah negeri dan swasta lakukan sesuai BSNP tidak terdapat pembeda, tetapi sekolah swasta mempunyai biaya yang sumbernya melebihi sekolah negeri yang fokusnya hanya dari dana bantuan pemerintah dengan dana BOS. Hal itu sesuai yang diungkapkan Sergiovanni, (2005:173) bahwasanya "keuangan sekolah akan sangat tergantung dengan keterbukaan dan ketepatan penggunaan anggaran oleh manajemen sekolah dan bendahara dalam melakukan pembelanjannya, apabila bagus pengelolannya maka akan terkesan bagus juga penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut." Pandangan itu diterangkan pengelolaan sekolah sangat penting terkait pembiayaan sekolah agar dilaksanakan dengan adil dan terbuka, yang bisa membiayai seluruh aspek pelaksanaan pendidikan dengan merata dan memprioritaskan pada aktivitas kesiswaan.

Seluruh anggaran biaya bagi item aktivitas sekolah telah tersusun pada RKAS dengan sistematis, dan dilakukan berdasarkan program yang ditentukan, dan melaporkan dengan berkala sesuai ketentuannya. Kualifikasi standar pembiayaan telah baik dibantu dari dokumen rencana, penyelenggaraan, dan evaluasinya yang baik. Hanya harus melengkapi secara tindak lanjutnya hasil evaluasinya. Sehingga kualifikasi standar ini sudah dicapai 90%.

#### 8. Standar Penilaian /Evaluasi

Melaksanakan standar pengelolaan penilaian yang sudah dilaksanakan dengan kondusif dan mempunyai beberapa langkah yang tersusun diawali dari mempersiapkan, melaksanakan, dan menindak lanjuti. Mencapai standar penilaian yang sekolah negeri dan swasta tetapkan tidak mempunyai perbedaan dan sudah sesuai pada BSNO, namun tindak lanjut hasil penilaian yang sekolah swasta lakukan lebih memotivasi siswa agar bisa mencapai KKM yang sudah ditentukan. sesuai yang diterangkan oleh Sutarrahan, (2007: 149) bahwa "penilaian yang dilakukan oleh sekolah hendaknya terencana dan prosedural, untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dalam menarik kesimpulan tentang hasil

belajar siswa baik penjenjangan kelas, maupun dalam penentuan kelulusan.”

Standar ini telah dicapai 93%. Prinsip penilaian telah memperoleh perhatian setiap guru, begitu pula dalam menentukan KKM. Hanya harus melengkapi dokumen proses penetapan KKM. Bentuk melaksanakan penilaian keterampilan, sikap, dan pengetahuan telah dipenuhi persyaratan kualifikasi standar penilaian telah baik, harus mempertahankannya bahkan harus selalu ditingkatkan, khususnya kisi-kisi instrumen keterampilan, penilaian sikap, dan ulangan harian.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini memperlihatkan delapan standar nasional pendidikan yang diterapkan pada SMP Al Ma'soem Jatinangor sudah dilakukan secara baik. Pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, sesuai data yang didapatkan sudah sangat baik terbukti dengan nilai akreditasi rata-rata 90%.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M.H. 2008. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- BSNP. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Untuk SMP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Depdibud. 1991. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran* Jakarta Bumi Aksara
- Rukiyah NK : 1994 *Masalah pengajaran sebagai suatu system* Jakarta Rineka
- Sallis, Edward. Alih Bahasa Ali Riyadi, Ahmad & Fahrurozi. 2006. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Irchisod.
- Sasongko, Rambat, Nur, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Penulisan Makalah, Referensi, dan Tesis)*. Bengkulu: Prodi MAP PPs FKIP Universitas Bengkulu
- Sudrajat, Ahmad. 2013. *Instrumen Standar Nasional Pendidikan*. Diakses dari <http://ahkmadsudrajat.wordpress.com/2013/07/09/>.
- Sutarrahan. 2007. *Keunggulan Hibrida Guru dalam Implementasi Teknologi Pembelajaran*. Garut: Orasi Ilmiah dalam Acara Wisuda STKIP Garut
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.